

Siaran Pers

Peluncuran Buku

“Daftar Referensi Bahan- bahan yang Memiliki Titik Kritis Halal dan Substitusi Bahan Non-Halal”

Jakarta, 20 Januari 2021 – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan penerima King Faisal International Prize 2018, Prof. Dr. Irwandi Jaswir, MSc., dan sejumlah tim peneliti lainnya, Ir. Elvina A. Rahayu, MP, Dr. Nancy Dewi Yuliana, MSc. dan Dr. Anna Priangani Roswiem, MS., meluncurkan buku “Daftar referensi bahan-bahan yang memiliki titik kritis halal dan substitusi bahan non-halal” pada Selasa (20/01).

Buku ini memuat hasil riset bahan baku dalam industri pangan, kosmetik, obat-obatan dan bahan gunaan lainnya yang memiliki titik kritis halal, serta potensi pengembangan substitusi bahan non-halal dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Penyusunan buku ini merupakan langkah nyata KNEKS sebagai satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia melalui penguatan rantai nilai halal.

Ventje Rahardjo, Direktur Eksekutif KNEKS, dalam sambutannya berharap buku ini bisa dijadikan rujukan bagi pelaku industri dalam melahirkan inovasi-inovasi baru terkait bahan baku melalui hasil riset oleh akademisi dan peneliti. Selain itu, untuk pelaku usaha dan masyarakat awam pun dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu sumber informasi dalam memahami titik kritis halal pada bahan dan memilih alternatif bahan pengganti, sehingga bisa mempermudah proses produksi halal dan sertifikasi halal.

Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Prof. Dr. Ismunandar, menyampaikan potensi Indonesia sangat besar dalam mengambil potensi pasar industri halal dunia. Cita-cita besar pengembangan industri halal melalui riset dan pengembangan bahan substitusi non-halal yang tertuang didalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2020-2045 yakni menjadikan Indonesia berdaya saing dan berdaulat berbasis IPTEK.

Ia menambahkan, saat ini fokus BRIN dalam Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 adalah mengembangkan riset bahan substitusi impor khususnya pada industri pangan, pertanian dan kesehatan yang juga disesuaikan dengan kebutuhan halal. Contoh potensi dan inovasi riset yang bisa dilakukan dalam menunjang kebutuhan industri ialah eksplorasi sumber gelatin halal, pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) untuk industri pangan, obat, dan kosmetik, serta pemanfaatan komoditas unggul Indonesia lainnya, seperti cokelat, teh, kopi, sebagai perisa dan *seasoning* (bumbu).

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat memacu lahirnya riset-riset dan inovasi terkait bahan substitusi non-halal yang akan mendukung perkembangan industri halal, bahan substitusi impor, dan perekonomian nasional.

Berdasarkan Global Islamic Economy Report 2020, konsumsi muslim dunia terhadap makanan halal terus meningkat yaitu 1.13 Triliun US Dolar (2018) menjadi 1.17 Triliun US Dolar di tahun 2019 dan diekspektasikan akan terus tumbuh menjadi 1.38 Triliun US Dolar di tahun 2024. Untuk Indonesia sendiri, konsumsi muslim terhadap makanan di tahun 2018 mencapai 173 Miliar US Dolar. Tidak hanya pada sektor makanan, untuk sektor obat dan kosmetik, konsumen muslim dunia memiliki besar konsumsi 92 Miliar US Dolar untuk obat halal dan 64 Miliar US Dolar untuk kosmetik halal dan diprediksi akan terus meningkat mencapai 134 Miliar US Dolar dan 95 Miliar US Dolar di tahun 2024.

Tidak hanya negara muslim di dunia, melainkan banyak negara yang berpenduduk minoritas muslim berlomba memanfaatkan kue besar industri halal tersebut. Hingga saat ini, Indonesia belum masuk 5 besar negara produsen halal dunia. Saat ini negara pengekspor daging halal terbesar di dunia adalah Brazil, Australia, Sudan, India, dan Turki. Sedangkan untuk produk farmasi pengekspor terbesar di dunia antara lain Jerman, Prancis, Amerika Serikat, India, dan Inggris. Serta, untuk pengekspor kosmetik halal terbesar di dunia diantaranya adalah Perancis, UAE, Jerman, Amerika Serikat, dan China.

Oleh karena itu, Prof. Irwandi Jaswir menyampaikan bahwa buku ini berisikan daftar potensi bahan-bahan baku lokal Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi halal dalam negeri dan menghasilkan produk bernilai tambah. Sehingga, Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus membuka peluang ekonomi baru untuk masyarakat.

Tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini, antara lain (1) Bahan baku, (2) *Processing* yaitu termasuk penggunaan bahan tambah atau *additives, packaging, storage*, distribusi, dan aspek operasional lainnya, serta (3) *Authentication* atau cara menganalisa titik kritis halal. Ketiga hal tersebut saling terkait dalam jaminan produk halal dan memerlukan riset-riset dan inovasi berkelanjutan untuk realisasi pemenuhan kebutuhan industri.

Buku ini bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, akademisi, peneliti, kementerian/Lembaga, pelaku industri, perusahaan swasta, untuk semakin memahami industri halal dan mengawali inisiatif-inisiatif baru berdasarkan peran dan kompetensi masing-masing dalam menghidupkan ekosistem industri halal di Indonesia. Inisiatif tersebut dapat berbentuk program *halal awareness*, penguatan *halal supply chain* oleh UMKM, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas penunjang kegiatan industri halal lainnya.

Direktur Industri Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, menambahkan KNEKS akan menggunakan buku ini sebagai materi dalam merealisasikan Program Nasional Pembinaan Menuju UMKM Bersertifikasi Halal yang akan disinergikan dengan seluruh kementerian/lembaga terkait. Dalam program tersebut, pelaku usaha akan didorong untuk lebih memahami titik kritis halal dalam bahan baku, proses produksi, dan mendapatkan akses terhadap bahan substitusi non-halal yang diperlukan. Kedepannya bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan, KNEKS akan terus memperkuat Gerakan Indonesia memproduksi bahan baku halal yang lebih banyak lagi di Indonesia.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Inza Putra – Kepala Divisi Promosi dan Hubungan Strategis

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Gedung Permata Kuningan Lantai PH

Jl. Kuningan Mulia kav. 9C, Jakarta 12830

Telepon: (021) 80683349 | Email: inza.putra@kneks.go.id | www.kneks.go.id

Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNEKS didirikan tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. KNEKS dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian, dan Menteri Keuangan menjadi Sekretaris merangkap anggota.

KNEKS didirikan untuk melakukan tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas, KNEKS menjalankan fungsi Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana araha kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah; Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka anggota KNEKS terdiri 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua lembaga pemerintah dan 2 Instansi lainnya, yaitu: Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI dan Ketua Umum KADIN.